

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah berupa Laporan Keuangan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, aset dan kinerja sebagai bahan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah :

- a. menyediakan informasi mengenai jumlah aset dan ekuitas dana satuan kerja;
- b. menyediakan informasi berkaitan dengan kemampuan dan kelemahan satuan kerja;
- c. menyediakan informasi sebagai bahan evaluasi bagi pengambil keputusan;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin atas pelaksanaan APBD Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Bupati Tapin No.11 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 171 tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD



- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
 - Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
 - Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan – LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas
 - Bab IV Penjelasan Atas Informasi-informasi non Keuangan SKPD
 - Bab V Penutup
- Lampiran



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Capaian Kinerja Keuangan SOPD Kecamatan Hatungun yang terdiri dari 6 (Enam) Program /Kegiatan, dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 4.736.173.229,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 3.910.246.799,-** atau **82,56 %**.

Berikut adalah rincian anggaran belanja berdasarkan Program/Kegiatan beserta realisasi penyerapan dana pada masing-masing kegiatan :

No	Jenis Belanja	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.344.039.703	3.518.350.096	94,01
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21.349.340	20.957.400	98,16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.384	978.700	97,83
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.050.509	2.000.000	97,54
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.384	978.700	97,83
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.050.509	2.000.000	97,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.247.554	15.000.000	98,38
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.801.874.269	1.705.185.827	94,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.946.153	1.700.693.727	94,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD	1.500.365	1.492.100	99,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran SKPD	3.075.570	3.000.000	97,54
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	699.695.151	699.321.575,	99,95
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.275.844	22.275.844	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.005.030	40.001.654	99,99
	Penyediaan bahan Logistik kantor	92.527.158	92.427.208	99,89
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.811.119	12.810.900	99,99



	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.076.000	531.805.969	99,95
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.896.384	405.290.000	99,12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.896.384	405.290.000	99,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.293.320	73.894.730	99,46
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.040	4.998.650	99,97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.760.000	11.362.800	96,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.533.280	57.533.280	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.283.420	613.700.564	45,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.293.420	90.002.564	99,68
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	14.990.000	14.990.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.230.000.000	508.708.000	41,36
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.233.280	36.233.280	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	36.233.280	36.233.280	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	36.233.280	36.233.280	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	130.080.423	129.943.430	99,89
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	123.079.757	122.943.430	99,89
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	3.500.333	3.417.800	97,64
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	119.579.424	119.525.630	99,96
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.000.666	7.000.000	99,99
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.500.333	3.500.000	99,99

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.500.333	3.500.000	99,99
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.666	7.000.000	99,99
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.666	7.000.000	99,99
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.500.333	3.500.000	99,99
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.333	3.500.000	99,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.583.592	180.583.010	99,99
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.583.592	180.583.010	99,99
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	40.000.599	40.000.400	99,99
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	140.582.993	140.582.610	99,99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.235.565	38.136.983	99,72
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.235.565	38.136.983	99,72
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.333	3.500.000	99,99
	Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.333	3.500.333	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.333	3.500.000	99,99
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.500.333	3.417.800	97,64
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	24.234.233	24.218.850	99,94
	JUMLAH	4.736.173.229	3.910.246.799	82,56

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada tahun 2023 yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, baik dari kurangnya jumlah pegawai yang ada dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan. Namun semuanya bisa diatasi dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada serta dengan pendekatan dan pembinaan yang dilakukan terus menerus sehingga Kecamatan Hatungun mampu menyelesaikan **82,56%** semua program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari Penjelasan masing – masing pos – pos Laporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Hatungun, jumlah realisasi pendapatan yang pada periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau 0% dari pendapatan yang ditargetkan Rp.0,-. Hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan rekening kas yang menambah ekuitas dana lancar Kecamatan Hatungun pada periode Tahun Anggaran 2023.

3.1.2 Belanja

Realisasi Belanja secara keseluruhan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **3.910.246.799,00** atau **82,56%** dari anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp. **4.736.173.229,00** yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	3.901.096.845,00	3.379.256.799,00	86,62	2.742.687.557,00
Belanja Modal	835.076.384,00	530.990.000,00	63,58	97.300.000,00
Jumlah	4.736.173.229,00	3.910.246.799,00	82,56	2.839.987.557,00

3.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.379.256.799,00 atau 86,62% dari anggaran Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp. 3.901.096.845,00 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	1.801.986.153,00	1.702.733.727,00	94,49	1.641.688.901,00
Belanja Barang dan Jasa	2.099.110.692,00	1.676.523.072,00	98,84	1.100.998.656,00



Jumlah	3.901.096.845,00	3.379.256.799,00	86,62	2.742.687.557,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.641.688.901,00 merupakan realisasi pembayaran :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai :	1.799.946.153,00	1.702.733.727,00	94,48
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	665.889.420,00	661.372.700,00	99,32
Tunjangan Keluarga	81.823.622,00	77.584.780,00	94,81
Tunjangan Jabatan	70.320.000,00	68.470.000,00	97,36
Tunjangan Fungsional Umum	17.710.000,00	14.220.000,00	80,29
Tunjangan Beras	45.744.694,00	43.452.000,00	87,91
Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	3.235.653,00	2.628.519,00	94,98
Pembulatan Gaji	1.022.764,00	8.788,00	0,85
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	351.921.400,00	275.475.586,00	78,27
Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja	61.293.830,00	58.159.077,00	99,33
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	500.984.770,00	499.322.277,00	94,88
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100
JUMLAH	1.799.946.153,00	1.702.733.727,00	94,48

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.676.523.072,00 merupakan realisasi pembayaran :

Jenis Belanja	Realisasi (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa :	1.676.523.072,00
Belanja Barang Pakai Habis	692.066.093,00
Belanja Jasa Kantor	98.897.600,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	466.560,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.263.800,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.990.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	380.968.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.871.019,00
JUMLAH	1.676.523.072,00

3.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 530.990.000,00 atau 63,58 % dari anggaran Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp. 835.076.384,00 yang terdiri dari :



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.896.384,00	405.290.000,00	99,12	97.300.000,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	426.180.000,00	125.700.000,00	29,49	0,00
Jumlah	835.076.384,00	530.990.000,00	63,58	97.300.000,00

3.1.3 Pendapatan - LO

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Operasional (LO) jumlah pendapatan-LO Kecamatan Hatungun periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

3.1.4 Beban

Jumlah Beban pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.224.575.102,00 dan Rp. 2.543.518.611,00. Jumlah tersebut merupakan Realisasi Beban Operasi dan Defisit Non Operasioal yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2023 sebesar Rp. 3.224.575.102,00.

Rincian Beban Daerah Tahun 2023 :

Uraian	Realisasi	
	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Operasi	3.206.125.102,00	2.437.698.902,00
Beban Pegawai	1.702.733.727,00	1.641.688.901,00
Beban Barang dan Jasa	1.303.091.072,00	796.010.001,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	200.300.303,00	105.819.709,00
Defisit Non Operasional - LO	18.450.000,00	56.586.531,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	18.450.000,00	49.233.178,00
Jumlah	3.224.575.102,00	2.543.518.611,00

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 :

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Pegawai – LO	1.702.733.727,00
Beban Gaji Pokok ASN	661.372.700,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	77.584.780,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	68.470.000,00



Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.220.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	43.452.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	2.628.519,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	8.788,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	275.475.586,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja	58.159.077,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	499.322.277,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00
Jumlah	1.702.733.727,00

Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun 2023 :

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Barang dan Jasa - LO	796.010.001,00
Beban Barang Pakai Habis	279.831.654,00
Beban Jasa Kantor	135.755.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.984.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.938.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	260.501.347
Jumlah	796.010.001,00

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 :

Uraian	Saldo
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	200.300.303,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80.976.161,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	119.324.142,00
Jumlah	200.300.303,00

Defisit Non Operasional-LO

Dari Kegiatan Non Operasional, posisi Defisit Non Operasional periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 18.450.000,00**.

3.1.5 Aset

3.1.5.1 Aset Lancar

3.1.5.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 yang merupakan saldo kas bendahara pengeluaran pada Bank Kalsel Cabang Rantau dengan Nomor Rekening 006.00.04.00426.7.

3.1.5.1.2 Persediaan

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 :

Bulan	Persediaan	Pemakaian	Sisa
Januari	7.658.500,00	7.658.500,00	0,00
Februari	3.058.200,00	3.058.200,00	0,00
Maret	0,00	0,00	0,00
April	0,00	0,00	0,00
Mei	4.023.250,00	4.023.250,00	0,00
Juni	0,00	0,00	0,00
Juli	2.312.050,00	2.312.050,00	0,00
Agustus	0,00	0,00	0,00
September	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
Oktober	2.348.750,00	2.348.750,00	0,00
Nopember	4.067.500,00	4.067.500,00	0,00
Desember	524.000,00	0,00	524.000,00
Jumlah	25.342.250,00	24.818.250,00	524.000,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 524.000,00 sebagaimana tergambar dalam Berita Acara Stock Opname Tahun 2023.

3.1.5.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.296.173.571,00 yang terdiri dari :

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
1. Tanah	1.042.364.000,00	1.502.364.000,00
2. Peralatan dan Mesin	1.062.777.043,00	800.687.043,00
3. Gedung dan Bangunan	2.610.153.655,00	1.396.505.655,00
4. Akumulasi Penyusutan	(1.478.933.430,00)	(1.403.383.127,00)
Jumlah	3.236.361.268,00	2.296.173.571,00

3.1.5.2.1 Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.042.364.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp 1.502.364.000,00



b.	Mutasi Tahun 2023	Rp	460.000.000,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp	1.042.364.000,00

Untuk Tahun Anggaran 2023 ada pengurangan aset tetap berupa hibah tanah dari Kantor Kecamatan Hatungun kepada Pemerintah Desa Hatungun.

3.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 800.687.043,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp 800.687.043,00
b.	Mutasi Tahun 2023 • Belanja Modal (Bertambah)	Rp 262.090.000,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp 1.062.777.043,00

Untuk Tahun 2023 ada penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp 262.090.000,00.

3.1.5.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.396.505.655,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp 1.396.505.655,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp 1.213.648.000,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp 2.610.153.655,00

Untuk Tahun Anggaran 2023 ada penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.213.648.000,00 dari Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Hatungun.

3.1.5.2.4 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.478.933.430,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023
----	--------	--------------------------



1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	Rp. (15.950.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	Rp. (334.969.017,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. (88.783.176,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. (12.991.875,00)
5	Akumulasi Penyusutan Komputer	Rp. (71.839.091,00)
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	Rp. (954.400.271,00)
JUMLAH		Rp. (1.478.933.430,00)

3.1.5.2.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.812.500,00.

No.	Uraian	Jumlah
a.	Aset Lain-lain	Rp. 252.801.000,00
b.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp. 232.238.500,00)
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 5.812.500,00

3.1.6 Kewajiban

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 707.585.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 707.585.000,00.

Uraian	Saldo
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 0,00
Utang Bunga	Rp. 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp. 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. 0,00
Utang Belanja	Rp. 414.285.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp. 293.300.000,00
Jumlah	Rp. 707.585.000,00

3.1.6.1 Utang Belanja



Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 414.285.000,00 terdiri atas :

Uraian	Saldo
Utang Belanja Jasa	Rp. 107.685.000,00
Utang Belanja Pemeliharaan	Rp. 306.600.000,00
JUMLAH	Rp. 414.285.000,00

3.1.6.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 293.300.000,00 terdiri atas :

Uraian	Saldo
Utang Pengadaan Aset Tetap	Rp. 293.300.000,00
JUMLAH	Rp. 293.300.000,00

3.1.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.535.112.768,00 dan Rp. 2.309.441.071,00. Nilai tersebut juga merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp. 3.242.697.768,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp. 707.585.000,00.

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp.)
Jumlah Aset	2.309.644.571,00	933.053.197,00	3.242.697.768,00
Jumlah Kewajiban	203.500,00	707.381.500,00	707.585.000,00
Jumlah Ekuitas	2.309.441.071,00	225.671.697,00	2.535.112.768,00

BAB IV**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD****4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan memiliki fungsi:

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas – tugas pemerintah umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

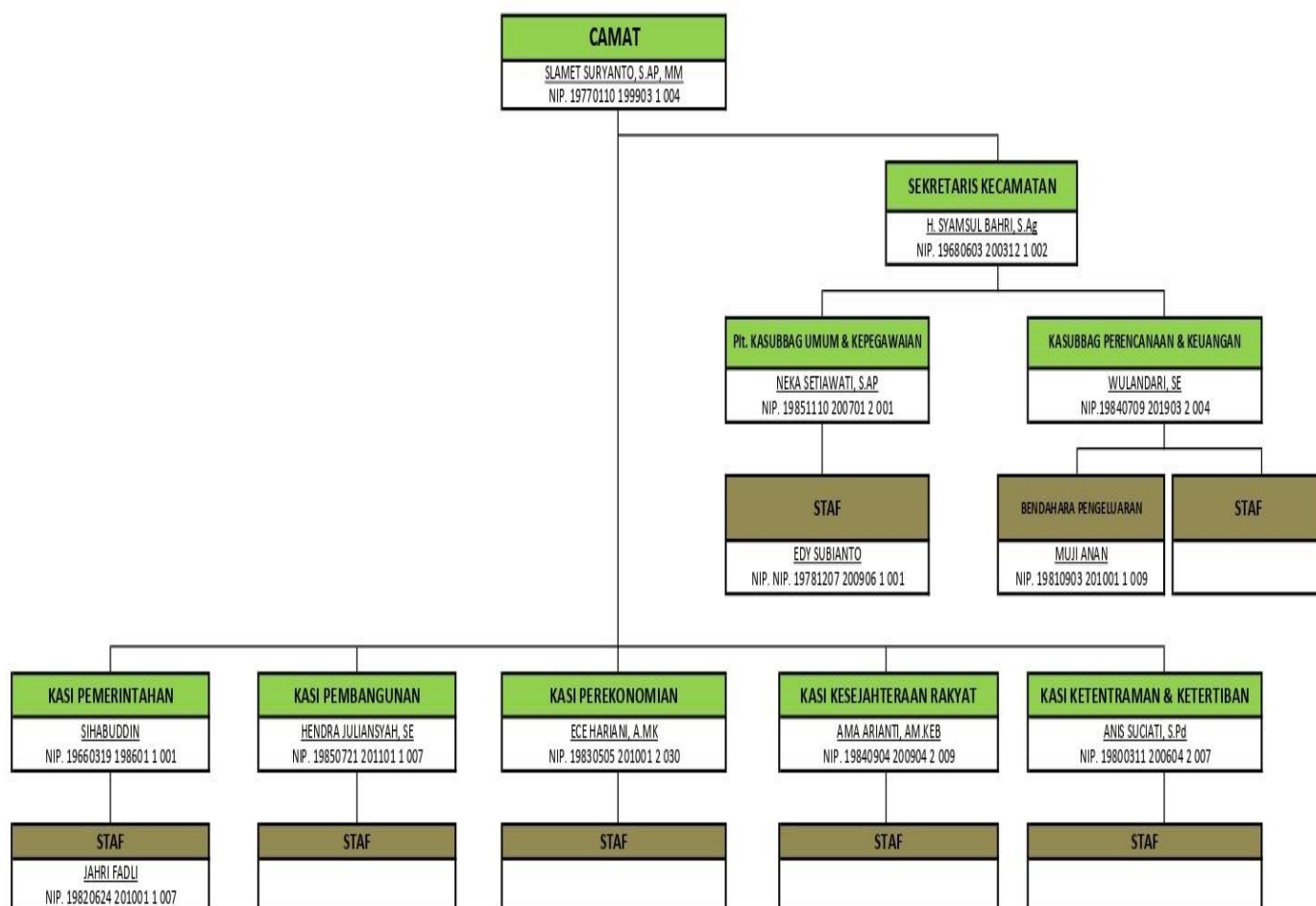
Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan,
Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelurahan

4.2 Struktur Organisasi

Menurut dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Susunan Organisasi Kecamatan Hatungun sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN HATUNGUN



4.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, serta golongan ruang dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Hatungun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2023

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 2	1	Pembina (IV/a)	1	III.a	1
		1	Penata Tingkat I (III/d)	1	IV.a	1
		1	Penata (III/c)	1	IV.a	1
2.	Strata 1	4	Pembina (IV/a)	1	III.b	1
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	IV.b	1
			Penata Muda (III/a)	1	-	1
			Pengatur (II/c)	1	-	1
3.	DIII	2	Penata (III/c)	2	IV.a	2
4.	SLTA	3	Penata Tk. I (III/d)	1	IV.a	1
			Pengatur Muda Tk. I (II/d)	2	-	2
Jumlah		12		12		12

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 4 (empat) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 2 (dua) orang, sebanyak 3 (tiga) orang berpendidikan SLTA . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang S1.

Secara kuantitas, Kecamatan Hatungun masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 12 (dua belas) ASN. Dari segi Kualitas, Kecamatan Hatungun mempunyai SDM kategori baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan. Dengan demikian SDM Kecamatan Hatungun dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

BAB V**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Hatungun atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebesar Rp. 3.910.246.799,00 atau 82,56 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.736.173.229,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.242.697.768,00
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 707.585.000,00
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.535.112.768,00

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Tapin.

Camat Hatungun,



SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
NIP. 19770110 199903 1 004